

PRABOWO BERKERAS HATI GAS WOOSH KE BANYUWANGI

Restrukturisasi Utang Belum Jelas, APBN Siap Bayar Rp 1,2 T/Tahun

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan proyek kereta cepat nasional Whoosh. Ia memastikan megaprojek tersebut tidak akan berhenti di Surabaya seperti rencana awal, melainkan diteruskan hingga ke Banyuwangi, Jawa Timur. Tak hanya di Jawa, Prabowo menyatakan pemerintah juga berencana memperluas jaringan rel ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Padahal, utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) masih menumpuk. Bahkan Danantara mengakui belum ada kesepakatan restrukturisasi dengan China. Hingga kini, utang pokok proyek Whoosh mencapai Rp 81,3 triliun. Soal itu, Prabowo bimang tak masalah harus bayar utang per tahunnya Rp 1,2 triliun. Penggunaan APBN menjadi opsi untuk menuntaskan polemik utang dan pembiayaan operasionalnya.

BACA HAL 11...

Presiden Prabowo Subianto saat menjajal kereta rel listrik (KRL) commuter line Jabodetabek usai peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Cideng, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). (dok.ytSetpres)

Total Utang

**RP 116 TRILIUN
(SEKITAR 7,2 MILIAR USD)**

Sumber Pembiayaan

- 75% pinjaman dari China Development Bank (CDB).
- 25% melalui ekuitas/pinjaman internal konsorsium.

Kerugian PSBI/KCIC:

- 2024: Kerugian Rp 4,195 triliun.
- Semester I 2025: Kerugian tambahan Rp 1,625 triliun.

Pembengkakan Biaya (Cost Overrun)
Rp 19,5 triliun (1,2 miliar USD).

Skema Pinjaman CDB

Tenor 40 tahun dengan bunga tetap 2% per tahun.

Struktur Kepemilikan:

- PSBI (Konsorsium Indonesia) memegang 60% saham.
- Konsorsium China memegang 40% saham.
- PSBI terdiri dari KAI, WIKA, Jasa Marga, PTPN VIII,

**Fakta dan
Data Utang
Proyek
Kereta Cepat
Whoosh**

TERSANDUNG PENIPUAN DIGITAL, DANA RP2 PROGRAM MBG HILANG

Pemerintah tengah memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terungkap kasus kehilangan dana senilai sekitar Rp2 miliar di dua satuan layanan program di Bandung dan Bogor. Penyebabnya adalah kasus penipuan digital. Di sisi lain, pemerintah juga berencana memperluas penerima manfaat MBG bagi kelompok lanjut usia (lansia) dan penyandang disabilitas mulai tahun depan.



Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Halim 02 di Jakarta Timur, Jumat (23/10/2025). (Bloomberg)

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi MBG, Nanik Sudaryati Deyang, membenarkan adanya kasus penipuan digital yang menyebabkan raibnya dana tersebut.

“Benar, dana sekitar dua miliar rupiah hilang, satu di SPPG Bandung dan satu di Bogor. Kasusnya akibat manipulasi data perbankan dalam bentuk penipuan digital,” ujar Nanik kepada Bloomberg Technoz, Selasa (4/11/2025).

Dua rekening yang terlibat, yakni milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban di Kabupaten Bandung Barat dan satuan di wilayah Bogor, kini telah ditutup untuk mencegah kerugian lebih lanjut. Kepala satuan sebelumnya juga ditarik ke pusat untuk pemeriksaan internal.

Kasus tersebut sempat viral di media sosial setelah akun TikTok SPPG Pangauban mengunggah keluhan kehilangan saldo program yang mencapai sekitar Rp1 miliar. Dugaan awal, pelaku memanfaatkan teknik rekayasa data perbankan setelah kepala satuan melakukan pergantian kata sandi melalui situs palsu.

Kasus kehilangan dana di SPPG Bandung dan Bogor kini tengah diselidiki oleh pihak berwenang. Pemerintah menjanjikan peningkatan sistem keamanan digital, audit menyeluruh, serta pembenahan tata kelola keuangan di seluruh satuan layanan MBG.

Diketahui, Program Makan Bergizi

Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, terpaksa dihentikan. Alasannya, dana

operasional yang semula mencapai Rp 1 miliar tiba-tiba hilang dari rekening lembaga tersebut. Kini, saldo yang tersisa hanya sekitar Rp 12 juta.

Pemilik SPPG Pangauban, Hendrik Irawan, menyebut hilangnya dana itu diduga akibat penipuan digital yang memanipulasi data perbankan. “Kami tidak bisa beroperasi karena dana terkuras oleh penipu. Ini jelas kelalaian dari Kepala SPPG,” ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).

Kejadian bermula pada Kamis (31/10/2025), ketika Kepala SPPG berinisial MC menerima notifikasi dari sistem BNI Direct yang meminta penggantian kata sandi. Merasa perlu menindaklanjuti, MC pun menghubungi layanan chat yang dikira resmi dari BNI melalui sebuah situs yang tampak meyakinkan.

Tak lama kemudian, seseorang yang mengaku petugas BNI menghubunginya dan mengirim

tautan untuk mengganti kata sandi. Dalam proses itu, MC juga diminta menyerahkan sejumlah data penting terkait rekening lembaga.

Karena khawatir dana dibekukan, MC mengikuti seluruh instruksi tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Namun setelah proses selesai, nomor sang “petugas” tak lagi bisa dihubungi. Saat memeriksa rekening melalui BNI Direct, saldo yang semula Rp 1 miliar sudah menyusut drastis, menyisakan hanya Rp 12 juta.

Menurut Hendrik, beberapa staf, termasuk akuntan dan ahli gizi, sempat memperingatkan MC agar tidak sembarangan menanggapi pesan tersebut. Namun peringatan itu tidak diindahkan. “Sudah diingatkan jangan langsung percaya, takutnya penipuan. Tapi tidak didengarkan. Akhirnya kejadian seperti ini,” kata Hendrik. (tin,ist,ant/dya)

KRONOLOGI RAIBNYA DANA MBG DI BANDUNG BARAT

- Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat.
- Nilai kerugian: Hampir Rp 1 miliar (saldo awal Rp 1 miliar, tersisa Rp 12 juta).
- Akibat: Program MBG terhenti total karena tidak ada dana operasional.
- Kronologi Kejadian
 - 31 Oktober 2025: Kepala SPPG (berinisial MC) menerima notifikasi dari sistem BNI Direct yang meminta penggantian kata sandi.
 - MC kemudian menghubungi layanan chat palsu yang dikira resmi dari BNI.
 - Pihak penipu mengirim tautan palsu dan meminta data rekening institusi. Setelah data diberikan, nomor penipu tak bisa dihubungi lagi.
 - MC memeriksa rekening dan menemukan saldo tinggal Rp 12 juta.
- Dugaan Penyebab
 - Penipuan digital (phishing) melalui situs dan chat palsu yang menyerupai sistem resmi perbankan (BNI Direct).
 - Ada kelalaian dari Kepala SPPG karena tidak memverifikasi sumber pesan.



Modus Ompreng dari China: Label dan SNI Palsu

BADAN Gizi Nasional (BGN) mengungkap adanya praktik pemalsuan perlengkapan makan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Modusnya, produk berupa ompreng atau food tray impor dari China diberi label “Made in Indonesia” dan disertai tanda Standar Nasional Indonesia (SNI) palsu, seolah-olah merupakan produk lokal yang resmi dan berkualitas.

Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Deyang, menjelaskan bahwa produk-produk itu masuk ke Indonesia melalui jalur impor. “Barang-barang itu diimpor dari China. Setelah tiba di Indonesia, produk-produk itu kemudian diberi label made in Indonesia sehingga seolah-olah diproduksi secara lokal,” ujarnya dalam keterangan pers, Selasa (4/11/2025).

Nanik menambahkan, para pelaku tidak hanya memalsukan label asal barang, tetapi juga

menyematkan tanda SNI palsu dan logo resmi BGN tanpa izin pada produk ompreng tersebut.

“Pemalsuan label ini bisa menyesatkan masyarakat dan berpotensi membahayakan kesehatan, terutama jika bahan yang digunakan tidak memenuhi standar,” katanya.

Menurutnya, logo BGN yang ditempel tanpa izin dapat menimbulkan kesan bahwa produk tersebut resmi dan layak digunakan dalam program pemerintah. “Padahal ompreng MBG itu ditemplei logo tanpa izin,” tegas Nanik.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara melakukan inspeksi mendadak ke sebuah ruko di kawasan Ancol, Pademangan. Ruko tersebut diduga menjadi tempat produksi dan pemalsuan label untuk perlengkapan makan program MBG.

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah barang impor yang sudah diberi label palsu “Made

in Indonesia”, tanda SNI tiruan, serta logo BGN.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara, Kopol Onkoseno, menyebut pihaknya masih menelusuri laporan masyarakat terkait kasus ini. “Masih kami dalam informasi tersebut berdasarkan aduan yang masuk,” ujarnya, Sabtu (1/11/2025).

Barang-barang yang ditemukan berupa alat dapur dan food tray—perlengkapan yang biasa digunakan dalam pelaksanaan program MBG. (wid,rls/dya)

DPR MASIH GAMANG MASA TUNGGU HAJI DISAMAKAN

Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) resmi menyesuaikan sistem pembagian kuota dan masa tunggu ibadah haji mulai tahun 2026. Kebijakan baru ini menargetkan pemerataan masa tunggu jemaah di seluruh provinsi menjadi 26 tahun, menggantikan sistem lama yang menyebabkan ketimpangan, dengan beberapa daerah menunggu hingga 47 tahun. Meski sudah diputuskan namun beberapa pihak, termasuk anggota DPR masih ada yang gamang. Alasannya, provinsi dengan daftar tunggu panjang, seperti Jawa Barat yang kehilangan sekitar 9.000 kuota, sementara daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) justru mendapat tambahan. Prinsip keadilan pun diminta menjadi catatan penting.

Perubahan tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), yang menekankan prinsip keadilan dan proporsionalitas berdasarkan jumlah daftar tunggu di masing-masing daerah.

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq menegaskan bahwa penyesuaian masa tunggu harus diawasi dengan ketat agar distribusi kuota tetap adil. Ia menyoroti dampak langsung terhadap provinsi dengan daftar tunggu panjang, seperti Jawa Barat yang kehilangan sekitar 9.000 kuota, sementara daerah seperti Nusa Tenggara Barat (NTB) justru mendapat tambahan.

“Penyeragaman masa tunggu 26 tahun harus dikonsolidasikan dari pusat hingga daerah agar tidak menimbulkan ketimpangan baru. Prioritas tetap diberikan kepada jemaah lansia dan mereka yang memiliki risiko kesehatan tinggi,” ujar Maman dikutip Selasa (4/11/2025).

DPR berkomitmen untuk terus memantau implementasi sistem ini, termasuk koordinasi dengan pemerintah Arab Saudi agar mekanisme pemberangkatan dan penempatan maktab berjalan jelas dan efisien.

Kebijakan baru ini diharapkan dapat memperkuat rasa keadilan substantif dalam penyelenggaraan ibadah haji, sekaligus menjaga integritas sistem antrean nasional. Meskipun menimbulkan penyesuaian di sejumlah daerah, pemerintah dan DPR menilai reformasi ini menjadi langkah penting menuju sistem haji yang lebih transparan, merata, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah Indonesia.

Menurut Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, pembagian kuota kini disesuaikan dengan proporsi jumlah pendaftar haji di setiap provinsi. “Sebanyak 20 provinsi akan mengalami pengurangan kuota, sementara 10 provinsi lainnya mendapat tambahan. Tujuannya bukan mengurangi hak daerah, tetapi menciptakan pemerataan bagi seluruh calon jemaah,” jelas Dahnil dalam rapat kerja



Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Ist

bersama Komisi VIII DPR, Selasa (28/10/2025).

Puan: Awasi Kualitas

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Puan Maharani memastikan parlemen akan mengawal pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau keberangkatan 2026. Puan mengatakan besaran ongkos haji yang telah disepakati turun harus berimbang dengan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.

Politikus PDIP itu menyampaikan hal tersebut dalam pidato pembukaan

masa persidangan II DPR tahun sidang 2025-2026. “DPR RI memiliki komitmen untuk terus mengawal pelaksanaan ibadah haji agar berjalan transparan, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh calon jemaah,” kata Puan di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Adapun DPR dan pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2026 sebesar Rp 87,4 juta per jemaah. Biaya haji itu turun Rp 2 juta dibanding BPIH 2025 sebesar Rp 89,4 juta.

Dari total BPIH itu, setiap jemaah hanya perlu membayar sebesar Rp 54.193.807 sebagai biaya perjalanan ibadah haji atau Bipih. Adapun sisanya sekitar Rp 33.215.000 akan ditutup oleh subsidi pemerintah dari nilai manfaat yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan demikian jemaah menanggung sebanyak 62 persen dari total BPIH, sedangkan subsidi pemerintah menutup biaya sebesar 38 persen.(gu,ist,med/dya)

5 PROVINSI DENGAN BESARAN KUOTA HAJI TERBESAR

- Jawa Timur
42.409 jemaah
- Jawa Tengah
34.122 jemaah
- Jawa Barat
29.643 jemaah
- Banten
9.124 jemaah
- Sulawesi Selatan
9.670 jemaah

NEGARA-NEGARA YANG TERMASUK PROGRAM HAJI LANGSUNG

- ASIA
Timor Leste, Hong Kong-China, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, dan Taiwan-China.
- AMERIKA UTARA
Amerika Serikat, Kanada, dan Costa Rica.
- AMERIKA SELATAN
Argentina, Brasil, hingga Venezuela.
- EROPA
Inggris, Yunani, Andorra, dan negara Eropa lainnya.
- AFRIKA
Eswatini, Lesotho, hingga Afrika Selatan.
- OSEANIA
Australia, Kiribati, dan Selandia Baru.

Arab Saudi Buka Pendaftaran dari Negara Minoritas Muslim

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) Arab Saudi resmi membuka pendaftaran haji 2026 bagi umat Islam yang tinggal di negara dengan minoritas Muslim. Proses pendaftaran hanya dapat dilakukan melalui aplikasi resmi Nusuk Haji, tanpa perantara atau agen eksternal.

“Pendaftaran untuk musim haji 1447 H/2026 M kini telah dibuka. Jemaah dari negara-negara minoritas Muslim yang termasuk dalam Program Haji Langsung (Direct Haji Program) dapat mendaftar secara langsung melalui platform Nusuk Haji,” demikian pernyataan resmi Kemenhaj pada Selasa (4/11/2025).

Program ini ditujukan bagi umat Islam di negara-negara dengan populasi Muslim kecil agar mereka

dapat melaksanakan ibadah haji tanpa hambatan administrasi yang kompleks.

Menurut Kemenhaj, aplikasi Nusuk Haji dirancang untuk memudahkan jemaah dalam seluruh tahapan perjalanan haji — mulai dari pendaftaran akun, pemilihan paket resmi, hingga konfirmasi akomodasi.

Namun, tahap yang dibuka saat ini baru sebatas pendaftaran akun, sedangkan pemilihan paket dan pemesanan akomodasi akan diumumkan kemudian sesuai jadwal resmi yang ditetapkan Kemenhaj.

Dari pantauan di situs Nusuk, terdapat beberapa kategori paket yang ditawarkan, yaitu paket standar, premium, dan luks, dengan pilihan hotel berbintang 3, 4, dan 5. Durasi masa tinggal jemaah di Arab Saudi

bervariasi antara 10 hingga 14 hari.

Untuk negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, pelaksanaan haji tetap menggunakan sistem kerja sama antar-pemerintah (G to G / government to government) antara pemerintah Arab Saudi dan pemerintah negara pengirim jemaah.

Adapun puncak pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 diperkirakan akan berlangsung pada akhir Mei 2026.(tin,ist/dya)

JEJAK DOLAR HINGGA POUNDS DI OTT GUBERNUR RIAU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menancapkan taji setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Gubernur Riau, Abdul Wahid, bersama sejumlah pejabat dan pihak swasta. Dari operasi yang berlangsung di Pekanbaru, tim penyidik turut mengamankan sejumlah uang dalam berbagai mata uang. Mulai dari rupiah, dolar Amerika Serikat, hingga pound sterling (Pounds) Inggris, dengan nilai keseluruhan yang diperkirakan lebih dari satu miliar rupiah.

Meski enggan menyebutkan angka pastinya, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa jumlah uang tersebut jika dikonversi ke rupiah mencapai miliaran.

"Selain mengamankan para pihak, tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US dollar, dan pound sterling," ungkapnya, dalam keterangan resminya kepada wartawan di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia juga memastikan bahwa lembaga antirasuah kini tengah mendalami asal muasal uang yang diduga kuat berkaitan dengan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, khususnya di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

OTT tersebut dilakukan secara senyap pada Senin (3/11/2025) siang, sekitar pukul 13.00 WIB, di kantor Dinas PUPR Provinsi Riau, Jalan S.M. Amin, Pekanbaru. Dalam operasi itu, sepuluh orang diamankan, termasuk Gubernur Abdul Wahid. Mereka kemudian diterbangkan ke Jakarta dalam dua kloter untuk menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Nanti ada dua kloter, pagi dan siang. Selain para pihak yang diamankan, ada juga sejumlah uang sebagai barang bukti," ujar Budi menjelaskan tahapan pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Abdul Wahid dan pihak-pihak lain yang ikut diamankan. Hingga Selasa malam, lembaga tersebut masih menggelar ekspose internal guna menetapkan status hukum masing-masing pihak yang terlibat.

"Masih berlangsung ekspose," tutur Budi singkat. Ia meminta publik bersabar karena seluruh proses harus didasarkan pada bukti dan analisis hukum yang matang.

Ketua KPK Setyo Budiyo juga mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan tersebut masih dalam tahap pendalaman. "Benar, sementara masih berproses," ujarnya.

Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto turut membenarkan kabar penangkapan Gubernur Riau. "Ya," katanya kepada wartawan, membenarkan bahwa kepala daerah tersebut kini tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik.



Gubernur Riau Abdul Wahid (tengah) digiring petugas saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).ant

Orang Kepercayaan Serahkan Diri

Dari kesepuluh orang yang diamankan, sembilan di antaranya langsung dibawa ke Jakarta. Salah satu yang menjadi perhatian publik adalah Tata Maulana (TM), kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal sebagai orang kepercayaan Gubernur Abdul Wahid. Ia tiba di Gedung KPK sekitar pukul 18.56 WIB mengenakan rompi hijau olive dan kemeja oranye tua, dikawal ketat oleh

petugas KPK dan kepolisian tanpa sepatah kata pun kepada awak media.

"Yang bersangkutan adalah pihak swasta, orang kepercayaan Saudara AW," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.

Sementara, Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa pagi sekitar pukul 09.35 WIB, dengan mengenakan masker putih dan kaus berwarna senada, membawa tas hijau di tangan kanan. Ia memilih bungkam

PKB Belum Ambil Keputusan

WAKIL Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cucun Ahmad Syamsurijal menyatakan partainya belum mengambil keputusan terkait status keanggotaan Gubernur Riau Abdul Wahid, yang saat ini terjerat operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menegaskan, PKB memilih menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK sebelum menentukan langkah lebih lanjut.

"Kami masih menunggu penjelasan dari KPK. Saat ini belum bisa mengambil keputusan apa pun karena proses hukumnya masih berjalan," ujar Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, partai juga belum membahas kemungkinan pemberian bantuan hukum kepada Abdul Wahid hingga status hukumnya jelas.

Sebelumnya Ketua Harian DPP

PKB Ais Shafiyah Asfar menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

"Sebagai kader PKB, kami menghormati seluruh tahapan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum," ujar Ais kepada wartawan, Senin (3/11/2025).

Ia menegaskan, PKB berpegang pada prinsip bahwa upaya pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Ais menambahkan, pihaknya percaya KPK akan bekerja secara profesional dan transparan. Ia berharap kejadian ini bisa menjadi bahan refleksi bagi para pejabat publik untuk memperkuat integritas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan amanah rakyat.

"Saya yakin KPK menjalankan tugasnya dengan profesional. Semoga peristiwa ini menjadi

saat dikerubungi wartawan dan hanya mengangkat tangan sebelum melangkah masuk ke ruang pemeriksaan. Di belakangnya, tampak Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Arif Setiawan, dan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP, Ferry Yunanda, ikut dikawal ketat oleh aparat.

Sementara rombongan kloter kedua tiba pada sore harinya. Pemeriksaan dilakukan maraton sejak siang hingga malam hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai pasal yang disangkakan kepada Abdul Wahid. Namun, kuat dugaan bahwa kasus ini berkaitan dengan suap proyek infrastruktur dan pengaturan tender di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Riau.

Penangkapan Gubernur Riau menjadi OTT keenam KPK sepanjang tahun 2025, menegaskan bahwa praktik korupsi di level kepala daerah masih belum sepenuhnya terhapus. Sejak awal tahun, lembaga tersebut telah menindak sejumlah pejabat di berbagai daerah dan kementerian, mulai dari kasus suap proyek jalan di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara hingga kasus pemerasan di Kementerian Ketenagakerjaan. (wid,ant,ini/dya)

DAFTAR GUBERNUR RIAU YANG TERJERAT KASUS KORUPSI:



SALEH DJASIT (1998-2003)
Kasus: Korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran.
Status: Divonis 4 tahun penjara.



RUSLI ZAINAL (2003-2013)
Kasus: Suap pembangunan venue PON XVIII Riau 2012 dan penyalahgunaan izin kehutanan.
Status: Divonis 14 tahun penjara.



ANNAS MAAMUN (2014-2019)
Kasus: Suap alih fungsi kawasan hutan jadi perkebunan sawit.
Status: Divonis 7 tahun penjara, sempat mendapat grasi dari Presiden.



ABDUL WAHID (2025-2030)
Kasus: Dugaan korupsi proyek Dinas PUPR Riau (OTT KPK).
Status: Dalam proses hukum (penyelidikan/ penyidikan).

peringat penting bagi seluruh pejabat publik untuk terus menjaga integritas dan akuntabilitas," jelasnya.

Lebih lanjut, Ais menegaskan PKB akan tetap konsisten mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih serta berpihak pada kepentingan rakyat. (wid,ist/dya)

WASPADA! RI DIKEPUNG 2.900 BENCANA, ADA 20 KEJADIAN/HARI

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan data, sepanjang tahun 2025, Indonesia telah dilanda sedikitnya 2.900 bencana alam. Dari banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga kebakaran hutan dan lahan, semuanya terjadi dengan frekuensi yang mencengangkan. Diungkapkan, rata-rata ada 15 hingga 20 kejadian setiap hari.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto membenarkan, tidak ada satu pun kabupaten atau kota di Indonesia yang bebas dari risiko bencana.

Per hari ini, 4 November 2025, BNPB mencatat sudah ada 2.900 bencana di seluruh Indonesia. Kalau dirata-ratakan, hampir 15 sampai 20 kali bencana per hari,” ujar Suharyanto saat memberikan sambutan dalam peresmian jembatan rehabilitasi di Desa Weton Kulon, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Senin (4/11/2025).

Dari 514 kabupaten dan kota yang tersebar di Nusantara, lebih dari 150 wilayah kini dikategorikan berisiko tinggi. Selebihnya, berada pada tingkat risiko sedang, tanpa satu pun yang bisa disebut “rendah”.

“Kita punya 514 kabupaten dan kota, dan tidak ada yang risikonya rendah. Lebih dari 150 termasuk tinggi, termasuk Kebumen,” katanya lagi.

Di antara wilayah yang disebut Suharyanto, Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi yang paling sering diuji. Dalam dua pekan terakhir saja, banjir melanda sejumlah kabupaten seperti Semarang, Grobogan, Pati, dan Demak. Meski air mulai surut setelah operasi darurat dilakukan, Suharyanto mengingatkan bahwa tanpa penanganan cepat, sebagian besar daerah itu akan kembali tergenang.

“Kalau tidak dilakukan penanganan, sebagian wilayah Jawa Tengah pasti banjir,” ujarnya dengan nada serius.

Namun bencana bukan hanya milik Pulau Jawa. Di ujung timur negeri, Papua baru saja menanggung duka akibat banjir bandang yang merenggut 15 jiwa. Sementara itu, di Bekasi, air bah juga sempat melumpuhkan permukiman warga. Semua ini menjadi bukti betapa rapuhnya keseimbangan alam ketika curah hujan ekstrem bertemu dengan alih fungsi lahan dan kurangnya sistem drainase.

Suharyanto menegaskan bahwa penanganan bencana tidak boleh berhenti di tahap tanggap darurat. Yang lebih berat justru datang setelah itu, proses rehabilitasi dan rekonstruksi yang menuntut kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan masyarakat.

“Kalau tanggap darurat itu mudah, seminggu atau dua minggu biasanya selesai. Tapi yang berat adalah pascabencana, memperbaiki infrastruktur, rumah warga, dan sarana publik,” tutur mantan Pangdam itu.

Sebagai contoh nyata, ia menunjuk jembatan yang baru saja diresmikan di Weton Kulon. Pembangunan kembali jembatan itu merupakan bagian dari program rehabilitasi dan rekonstruksi



Jembatan Weton Kulon yang diresmikan di Desa Weton Kulon, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. (Foto: BNPB)

pascabencana yang digagas BNPB. Melalui program hibah, daerah-daerah terdampak bencana dapat mengajukan usulan perbaikan infrastruktur. Suharyanto pun membuka pintu selebar-lebarnya.

“Silakan segera diajukan. Nanti bisa ditangani melalui program hibah rehabilitasi dan rekonstruksi dari BNPB. Ini bukti kehadiran negara untuk masyarakat,” katanya disambut tepuk tangan.

Sementara di tempat berbeda, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memimpin apel siaga bencana menjelang musim hujan dan libur panjang Natal 2025 serta Tahun Baru 2026, Selasa (4/11/2025).

Akhir tahun bukan hanya tentang kemeriahan perjalanan liburan, tetapi juga tentang risiko meningkatnya bencana di jalur transportasi utama. Karena itu, Kementerian PU, seperti

tahun-tahun sebelumnya, menyiapkan diri jauh-jauh hari.

“Jalan-jalan nasional kita siapkan, jangan sampai ada lubang-lubang. Jalan tol juga sama. Kemudian posko istirahat kita siapkan. Rest area, keluar-masuknya kita pastikan tidak ada kerusakan, parkir cukup, toiletnya cukup, dan seterusnya,” ujar Dody di hadapan para petugas lapangan. (tin,rls,kcm/dya)

JUMLAH KEJADIAN PER JENIS BENCANA (2025)*

- Gempa Bumi: 20 kejadian
- Erupsi Gunung Api: 4 kejadian
- Tsunami: 1 kejadian
- Banjir: 1.287 kejadian
- Cuaca Ekstrem: 539 kejadian
- Kebakaran Hutan: 506 kejadian
- Tanah Longsor: 188 kejadian
- Kekeringan: 39 kejadian
- Gelombang Pasang & Abrasi: 15 kejadian

*) Periode 1 Januari – 15 Oktober 2025
Sumber : BNPB



“Melihat kondisi saat ini, banjir, longsor, dan pohon tumbang di beberapa titik, memang mengarah ke tanggap darurat. Namun, secara administrasi kita masih dalam proses penetapan status siaga,” ujarnya, Selasa (4/11/2025).

BPBD bersama instansi terkait juga menyiapkan posko pengungsian tambahan, bantuan logistik, serta alat berat untuk mempercepat penanganan di daerah yang masih tergenang. Pemerintah Kabupaten Bandung mengimbau warga tetap waspada dan tidak memaksakan diri tinggal di rumah yang berisiko terendam. (wid,rls/dya)

Banjir Bandung hingga Longsor di Lumajang

Di Kabupaten Bandung, pemerintah daerah tengah mempertimbangkan penetapan status siaga darurat bencana akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak akhir Oktober. Sementara di Kabupaten Lumajang, delapan kecamatan dilaporkan terdampak bencana, menelan korban jiwa serta memaksa warga mengungsi.

Bencana banjir di Kabupaten Bandung terjadi di Kecamatan Bojongsoang dan Dayeuhkolot sejak Jumat (31/10/2025). Hingga kini, sebagian wilayah masih tergenang dengan ketinggian air antara 30 hingga 100 sentimeter. Curah hujan tinggi menyebabkan Sungai Cikapundung, Sungai Cipalasari, dan Sungai Citarum meluap dan merendam pemukiman warga.

Di Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, enam kampung

terdampak banjir, yakni Kampung Leuwi Bandung, Lamajang, Sukabirus, Cilisung, Cigempol, dan Asrama Yon Zipur. Sebagian warga mengungsi ke Masjid An-Nur RW 13 Kampung Sukabirus, dengan jumlah 14 kepala keluarga (KK) atau 34 jiwa. Di antaranya terdapat 3 lansia, 7 anak, 3 balita, dan 1 ibu hamil.

Sementara di Desa Dayeuhkolot sendiri, delapan kampung lainnya juga terendam air. Sebanyak 10 KK atau 24 jiwa mengungsi ke Shelter Desa Dayeuhkolot, terdiri dari 13 orang dewasa, 5 lansia, dan 1 ibu hamil.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bandung Beny Sonjaya mengatakan pihaknya tengah menyiapkan langkah penetapan status siaga darurat sembari terus melakukan asesmen lapangan.

Disnaker-PMPTSP Kota Malang Waswas Perlindungan Pekerja Informal saat Anggaran Turun



Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan. (Santi/Lentera)

MALANG - Anggaran yang diproyeksikan menurun pada tahun 2026 membuat Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang waswas. Diharapkan adanya kebijakan khusus

dari Wali Kota terkait program perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja informal tetap berjalan.

Kepala Disnaker-PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut dari total anggaran sebesar Rp7,2 miliar pada tahun 2025, Disnaker-PMPTSP hanya mendapatkan sekitar Rp4 miliar lebih untuk tahun anggaran 2026.

"Karena kebutuhan kami itu sekitar Rp5,3 miliar, jadi yang ter-cover baru sekitar Rp2 koma sekian miliar. Itu untuk satu tahun dan mencakup sekitar 25 ribu jiwa," ujar Arif, Selasa (4/11/2025).

Menurut Arif, penurunan anggaran tersebut juga dipengaruhi oleh berkurangnya Dana Bagi Hasil

Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Kota Malang. Jika sebelumnya DBHCHT mencapai sekitar Rp70 miliar, pada tahun 2026 jumlahnya diproyeksi menurun hingga Rp40 miliar lebih.

Kondisi ini membuat pihaknya harus melakukan penyesuaian dan menunggu kebijakan khusus dari Wali Kota Malang. Agar program perlindungan bagi pekerja informal tetap dapat berjalan optimal. "Harapannya nanti akan ada kebijakan dari Pak Wali," katanya.

Arif menjelaskan, program perlindungan bagi pekerja informal tersebut merupakan bagian dari implementasi Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kota Malang ditargetkan dapat meng-cover minimal 40 persen pekerja informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2025.

"Targetnya sampai akhir tahun 2025 itu sekitar 25 ribu pekerja

informal sudah terdaftar dalam program Jamsostek," jelasnya.

Ditambahkannya, sejak Oktober 2025 program ini sudah mulai disalurkan. Dari total 43 ribu data pekerja yang masuk ke Disnaker-PMPTSP, hanya 15 ribu yang dinyatakan lolos verifikasi karena berbagai kendala administrasi.

"Yang tidak lolos itu karena alamatnya tidak jelas, NIKnya tidak sesuai, atau datanya ganda. Kami juga menerima usulan dari berbagai kelompok seperti RT, Supeltas, kelompok tani, pedagang, dan UMKM," katanya.

Untuk 15 ribu pekerja yang lolos verifikasi, Disnaker-PMPTSP telah menyalurkan dana sekitar Rp250 juta sejak Oktober lalu. Sementara untuk bulan November ini, terdapat tambahan pengusulan sekitar 7.000 pekerja lagi yang sedang dalam proses verifikasi.

"Kalau ditotal, nanti di November ini kemungkinan naik jadi 22 ribuan pekerja informal yang sudah tercover," tambah Arif. (Santi/Dya)

Pemkab Malang Targetkan Pasang 857 Titik PJU di 72 Desa

MALANG - Ribuan kilometer ruas jalan di Kabupaten Malang hingga kini masih gelap tanpa penerangan. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang menargetkan pemasangan 857 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di 72 desa pada 23 kecamatan sepanjang tahun 2025.

"Pemenuhan fasilitas pelengkap jalan juga menjadi pekerjaan rumah besar. Salah satunya pemasangan PJU, karena masih banyak ruas jalan yang belum memiliki penerangan," ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (DPUBM) Kabupaten Malang, Khairul Isnaldi Kusuma, Selasa (4/11/2025).

Pria yang akrab dengan sapaan Oong, ini menyampaikan ada sekitar 1.084,2 hingga 1.167,6 kilometer jalan di wilayah Kabupaten Malang yang belum dilengkapi PJU. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan keamanan dan kenyamanan masyarakat, terutama saat malam hari.

Menurut Oong, di tahun 2025 ini pihaknya telah menganggarkan Rp12

miliar untuk pembangunan 857 titik PJU tersebut. Anggaran itu juga mencakup kegiatan perawatan dan pemeliharaan PJU yang sudah terpasang sebelumnya di seluruh wilayah Kabupaten Malang.

Dijelaskannya, penentuan lokasi prioritas pemasangan PJU mengacu pada hasil musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan. Usulan masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan titik-titik penerangan baru yang dinilai paling mendesak untuk dipasang.

"Sebagian besar usulan yang kami terima berasal dari wilayah yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas atau rawan tindak kejahatan," terang pejabat eselon II B di lingkungan Pemkab Malang tersebut.

Selain di daerah rawan kecelakaan dan kriminalitas, pemasangan PJU juga diprioritaskan di sekitar fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, jalur wisata, serta kawasan pusat kegiatan masyarakat. Pemasangan di lokasi-lokasi tersebut diharapkan dapat membantu mobilitas warga dan mendukung aktivitas ekonomi lokal, terutama pada malam hari.

Oong menambahkan, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Ia memastikan, seluruh proses pengerjaan dilakukan sesuai perencanaan teknis dan tetap memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah.

"Pemasangan dan pemeliharaan PJU kami lakukan secara bertahap di seluruh kecamatan, agar manfaatnya dapat dirasakan merata oleh masyarakat," katanya.

Selain pembangunan PJU, DPUBM juga tengah menyelesaikan sejumlah kegiatan lain yang bersumber dari belanja modal tahun anggaran 2025 sebesar Rp314 miliar. Disebutnya, dana tersebut juga digunakan untuk peningkatan dan rehabilitasi jalan, perbaikan jembatan, serta



Salah satu ruas jalan di Dusun Telasih, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, belum terpasang lampu penerangan jalan umum (PJU). (Santi/Lentera)

pembangunan drainase.

Sebagai contoh, lanjutnya, Jembatan Gunungjati, Kecamatan Jabung telah rampung dikerjakan. Jembatan tersebut dibangun dengan box culvert dengan panjang 7 meter dan lebar 5 meter. Pembangunan itu menggunakan APBD 2025 dengan nilai kontrak Rp751,5 juta. (Santi/Dya)

FILIPINA LUMPUH, 26 TEWAS DITERJANG TOPAN KALMAEGI

Deru angin bercampur suara hujan deras menggema di Filipina tengah ketika Topan Kalmaegi, yang secara lokal disebut Tino, menghantam kawasan padat penduduk pada Selasa (4/11/2025) pagi. Dalam hitungan jam, badai tropis itu menjelma menjadi bencana besar yang menewaskan sedikitnya 26 orang dan memaksa hampir 400.000 warga meninggalkan rumah mereka.

Di Kota Cebu, provinsi yang paling parah terdampak, banjir bandang datang tiba-tiba. Jalan utama berubah menjadi sungai cokelat berlumpur, mobil dan truk hanyut terbawa arus, dan warga terjebak di atap rumah menanti pertolongan. "Situasi di Cebu benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya," kata Gubernur Pamela Baricuatro dalam unggahan di Facebook.

"Kami memperkirakan angin akan menjadi faktor yang berbahaya, tetapi ternyata airlah yang benar-benar membahayakan warga kami. Banjir ini sungguh dahsyat."

Menurut laporan Wali Kota Cebu Nestor Archival, sedikitnya 12 warga desa di daerah pegunungan tewas setelah banjir bandang melanda permukiman mereka. "Sebagian besar meninggal karena tenggelam," ungkap Rafaelito Alejandro, wakil administrator pertahanan sipil Filipina, kepada AFP lewat sambungan telepon.

Di provinsi lain, seorang lansia tenggelam di Leyte, sementara di Bohol, seorang pria meninggal tertimpa pohon tumbang.

Data dari Badan Meteorologi Filipina (PAGASA) mencatat curah hujan ekstrem di sekitar ibu kota Provinsi Cebu sebesar 183 milimeter dalam 24 jam, jauh melampaui rata-rata bulanan yang hanya 131 milimeter. Spesialis cuaca negara bagian, Charmagne Varilla, menyebut kondisi ini "luar biasa dan berpotensi memicu banjir besar di wilayah pegunungan dan pesisir."

Topan Kalmaegi melanda Filipina dengan kecepatan angin 130 kilometer per jam dan hembusan mencapai 180 kilometer per jam. PAGASA memperingatkan adanya gelombang badai setinggi lebih dari 3 meter di wilayah pesisir yang bisa mengancam jiwa dalam 24 jam setelah badai melintas. Badai tersebut kini bergerak ke arah Laut Cina Selatan dan diperkirakan akan melintasi Vietnam tengah pada Rabu (5/11/2025) pagi.

Di tengah kepanikan, Otoritas Penerbangan Sipil Filipina membatalkan lebih dari 300 penerbangan pada Selasa dan 20



Tumpukan mobil tersapu banjir pada puncak Topan Kalmaegi di subdivisi Kota Cebu, Filipina.(afp)

penerbangan lagi untuk hari berikutnya. Pelabuhan ditutup, jaringan listrik padam di sebagian besar wilayah, dan komunikasi terputus di beberapa kota kecil di

pesisir timur.

Juru Bicara Badan Penanggulangan Bencana Filipina, Junie Castillo, menyatakan 387.000 warga telah dievakuasi secara

preventif ke pusat-pusat penampungan. "Kami berupaya memastikan semua evakuasi dilakukan sebelum malam tiba. Namun, di beberapa daerah, air naik terlalu cepat," katanya. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat nasional, terutama di wilayah Visayas Tengah, tempat Kalmaegi membuat kerusakan terparah.

Kawasan Cebu sebenarnya belum sepenuhnya pulih dari gempa bumi dahsyat yang mengguncang provinsi itu sebulan lalu dan menewaskan puluhan orang. Kini, bencana datang kembali dalam bentuk yang berbeda—banjir bandang dan longsor akibat curah hujan ekstrem.

Kalmaegi tercatat sebagai badai tropis ke-20 yang melanda Filipina tahun ini. Negara kepulauan itu memang dikenal sebagai salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia karena posisinya di Cincin Api Pasifik dan jalur utama badai dari Samudra Pasifik barat.

Rata-rata, Filipina dilintasi sekitar 20 topan per tahun, dan sebagian di antaranya menjadi badai mematikan. (gus,afp,ist/dya)

Sejarah mencatat tragedi nasional di Filipina Akibat Topan:

- **Topan Haiyan (Yolanda, 2013)** menjadi yang paling mematikan dengan korban lebih dari 6.300 jiwa dan lebih dari 1.000 orang masih hilang. Gelombang badai setinggi tujuh meter menghancurkan kota Tacloban dan menimbulkan kerugian lebih dari US\$13 miliar.
- **Topan Bopha (Pablo, 2012)** melanda Mindanao dengan kecepatan angin hingga 280 km/jam, menewaskan hampir 1.900 orang.
- **Topan Angela (Rosing, 1995)** membawa angin hingga 260 km/jam dan menewaskan 936 orang di wilayah Bicol dan Metro Manila.
- **Topan Rai (Odette, 2021)** menewaskan lebih dari 400 orang dan menyebabkan 1 juta warga kehilangan rumah.



akan kami sampaikan setelah informasi terverifikasi."

Cuaca ekstrem masih menjadi hambatan besar. Sisa sistem tekanan rendah dari Kalmaegi terus membawa hujan deras di bagian selatan negara itu. PAGASA, badan meteorologi Filipina, memperingatkan potensi banjir susulan dan tanah longsor di wilayah pegunungan. (xin,tin/dya)

Helikopter Militer Jatuh Saat Misi Bantuan Bencana

SEBUAH helikopter militer Super Huey milik Angkatan Udara Filipina (PAF) dilaporkan jatuh saat menjalankan misi bantuan untuk korban Topan Kalmaegi yang baru saja melanda Filipina. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa (4/11/2025) di wilayah Agusan del Sur, pulau Mindanao bagian utara.

Menurut Komando Mindanao Timur, helikopter tersebut tengah dalam perjalanan dari Davao City menuju Butuan City membawa tim penilai kerusakan dan logistik bantuan cepat. Namun, di tengah cuaca ekstrem sisa topan, kontak dengan helikopter terputus.

"Helikopter itu merupakan bagian dari empat armada yang sedang melakukan misi Penilaian Kerusakan Cepat dan Analisis Kebutuhan," ujar PAF dalam pernyataan resminya, dikutip dari kantor berita Xinhua.

Beberapa jam setelah komunikasi hilang, tim darurat diterjunkan untuk melakukan pencarian dan penyelamatan di area pegunungan yang sulit dijangkau. Hingga berita ini ditulis, belum ada laporan resmi terkait jumlah korban jiwa maupun kondisi awak.

"Operasi pencarian masih berlangsung. Cuaca buruk dan medan berat membuat proses pencarian terhambat," kata Juru Bicara PAF Kolonel Maynard Mariano kepada media setempat.

Pemerintah Filipina telah menetapkan status tanggap darurat nasional dan mengerahkan pasukan militer, Palang Merah, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (NDRRMC) untuk membantu korban di wilayah terpencil. Helikopter yang jatuh itu merupakan bagian dari misi bantuan tahap awal di Mindanao utara, wilayah yang sebelumnya juga dilanda gempa berkekuatan 7,4 SR bulan lalu.

Hingga Selasa sore, komunikasi radio dan sinyal GPS di beberapa wilayah Mindanao masih tidak stabil akibat badai dan pemadaman listrik. PAF menyatakan telah menyiapkan tim darat untuk menyisir lokasi kemungkinan jatuhnya helikopter, dibantu oleh drone pengintai milik Angkatan Darat Filipina.

"Kami memastikan bahwa penyelidikan menyeluruh akan dilakukan segera setelah situasi memungkinkan," ujar PAF dalam pernyataannya. "Rincian lebih lanjut

STUDI HARVARD: CUKUP JALAN KAKI, RISIKO KEMATIAN DAN KANKER TURUN DRASTIS

Dua penelitian berskala besar dari Harvard University kembali menunjukkan bahwa berjalan kaki, memiliki dampak luar biasa terhadap kesehatan dan umur panjang. Temuan ini berasal dari dua studi terpisah yang meneliti kebiasaan aktivitas fisik pada lansia hingga orang dewasa usi produktif. Hasilnya konsisten, semakin banyak seseorang melangkah, semakin kecil risiko kematian dini dan penyakit kronis yang mereka hadapi.

Studi pertama, yang dipublikasikan dalam *British Journal of Sports Medicine*, meneliti 13.547 perempuan Amerika berusia di atas 62 tahun. Para peserta memakai alat pelacak aktivitas selama tujuh hari berturut-turut dan dipantau lebih dari satu dekade. Meski banyak lansia mengalami kesulitan mempertahankan jumlah langkah harian, penelitian ini menunjukkan bahwa sekali saja mencapai 4.000 langkah dalam sehari sudah memberi manfaat besar.

Hasilnya, berjalan 4.000 langkah per hari satu atau dua kali dalam seminggu berkaitan dengan penurunan risiko kematian dini sebesar 26 persen, serta penurunan risiko kematian akibat penyakit jantung sebesar 27 persen. Ini dibandingkan mereka yang tidak pernah mencapai jumlah langkah tersebut. Pada kelompok yang mencapai 4.000 langkah minimal tiga hari dalam seminggu, risiko kematian dari berbagai penyebab turun hingga 40 persen.

Peneliti menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah frekuensi langkah, tetapi total aktivitas yang tercapai. "Tidak ada cara 'terbaik' untuk mencapai jumlah langkah tersebut."

Pesan utamanya adalah tetap bergerak sebanyak yang mampu dilakukan, tanpa harus terpaku pada pola tertentu. Peneliti menyimpulkan bahwa semakin banyak langkah yang diambil, apa pun polanya, semakin baik hasil kesehatannya.

Aktivitas Fisik 5 Jam/Minggu

Sementara itu, studi kedua dipimpin Dr Yiwen Zhang dari Harvard T.H. Chan School of Public Health. Menggunakan data tiga kohort besar di Amerika Serikat, penelitian ini mengikuti 231.067 partisipan selama sekitar 32 tahun. Tidak satu pun peserta memiliki riwayat kanker atau penyakit jantung di awal penelitian. Setiap dua hingga empat tahun, mereka mengisi survei aktivitas fisik yang mencakup jalan kaki, jogging, lari, bersepeda, berenang, olahraga

aerobik, aktivitas ringan, hingga pekerjaan luar ruangan.

Penelitian ini menemukan bahwa melakukan aktivitas fisik selama 5 jam per minggu, termasuk berjalan kaki, secara konsisten selama puluhan tahun dapat mengurangi risiko kanker sistem pencernaan, seperti kanker usus besar, hati, dan pankreas. Temuan ini didukung mekanisme biologis yang diperkuat oleh aktivitas fisik.

Seperti dikatakan Dr Zhang, "Aktivitas fisik mungkin memiliki efek anti-kanker sistemik, seperti meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan peradangan, dan memperkuat fungsi kekebalan tubuh."

Sepanjang studi, tercatat 6.358 kasus kanker pencernaan dan 3.791 kematian yang sudah diverifikasi melalui data medis. Peserta dengan tingkat aktivitas fisik lebih tinggi menunjukkan risiko jauh lebih rendah mengalami maupun meninggal akibat kanker pencernaan. Durasi aktivitas yang dianggap optimal mencapai sekitar 50 jam per minggu, tetapi manfaat signifikan sudah muncul pada

aktivitas minimal bila dilakukan terus-menerus dalam jangka panjang.

Meski berasal dari dua populasi berbeda, kedua studi ini menunjukkan benang merah yang sama, konsistensi aktivitas fisik adalah kunci, baik pada fase usia produktif maupun di usia lanjut. Bagi lansia, mencapai target langkah meski hanya sekali dalam seminggu tetap memberikan perbaikan signifikan terhadap kesehatan. Bagi orang usia 40-75 tahun, mempertahankan kebiasaan berjalan kaki selama bertahun-tahun memberi perlindungan kuat terhadap kanker dan kematian dini.

Walhasil, berjalan kaki bukan sekadar aktivitas ringan, melainkan investasi kesehatan yang sangat efektif. Tidak memerlukan alat, biaya, atau kemampuan khusus, langkah-langkah kecil yang dilakukan setiap hari dapat menjadi fondasi tubuh yang lebih sehat, lebih kuat, dan berumur lebih panjang. Penelitian Harvard menegaskan bahwa setiap langkah berarti, dan semakin banyak, semakin baik. (hvd,rls/dya)



DITEMUKAN PLANET MIRIP BUMI: DEKAT TATA SURYA, DIDUGA LAYAK HUNI

Penemuan baru dari dunia astronomi kembali memantik perhatian. Para ilmuwan melaporkan keberadaan kandidat planet super-Bumi yang mengorbit di zona layak huni bintang Gliese 251, sebuah bintang kerdil merah yang berjarak sekitar 18 tahun cahaya dari Tata Surya dan berada di konstelasi Gemini. Dengan jarak sedekat itu, sistem Gliese 251 menjadi salah satu target paling menarik dalam pencarian dunia yang berpotensi mendukung kehidupan.

Gliese 251, yang juga dikenal sebagai GJ 251, HD 265866, atau Wolf 294, masuk dalam daftar 100 bintang terdekat dari Matahari.

Kedekatan inilah yang

membuat penemuan terbarunya dianggap sebagai langkah penting untuk memahami kemungkinan adanya kehidupan di luar Bumi.

Berdasarkan analisis terbaru, sistem bintang ini diduga memiliki dua planet super-Bumi. Yang pertama, Gliese 251b, ditemukan pada 2020. Planet tersebut memiliki massa hampir empat kali Bumi dan menyelesaikan orbitnya dalam 14,2 hari. Sedangkan kandidat terbaru, Gliese 251c, ditemukan melalui pengamatan lanjutan menggunakan instrumen berpresisi tinggi.

Gliese 251c memiliki massa yang sangat mirip dengan Gliese 251b, yaitu sekitar 3,84 massa Bumi, tetapi periode orbitnya jauh lebih panjang, yakni 53,6 hari. Hal inilah yang membuatnya lebih menarik bagi ilmuwan, karena berada dalam zona layak huni, wilayah di sekitar bintang tempat suhu memungkinkan air tetap dalam bentuk cair.

Zona semacam ini menjadi syarat utama bagi para peneliti untuk menilai kemungkinan adanya kehidupan seperti yang kita pahami di Bumi.

Teknologi Spektrograf Generasi Baru

Penemuan Gliese 251c menggunakan instrumen Habitable-Zone Planet Finder (HPF), sebuah spektrograf inframerah berpresisi tinggi yang dipasang pada Teleskop Hobby-Eberly di Observatorium McDonald, Texas. Untuk memastikan keakuratannya, tim ilmuwan kembali mengonfirmasi sinyalnya dengan NEID spectrometer di Observatorium Nasional Kitt Peak, Arizona.

Paul Robertson, astronom dari

University of California, Irvine, menegaskan bahwa kedekatan sistem ini adalah alasan utama mengapa penemuan tersebut dianggap istimewa. "Kita telah menemukan begitu banyak eksoplanet. Tapi jarak Gliese 251c, hanya sekitar 18 tahun cahaya, menjadikannya seperti tetangga dekat dalam skala kosmik," ujarnya.

Dekatnya jarak tersebut memperbesar peluang bagi penelitian lanjutan, termasuk upaya mendeteksi atmosfer, komposisi permukaan, hingga tanda-tanda adanya air.

Walaupun sinyal Gliese 251c sangat kuat secara statistik, para ilmuwan tetap berhati-hati dalam menyimpulkan statusnya. Corey Beard dari Design West Technologies menegaskan bahwa setiap instrumen memiliki batas akurasi, sehingga konfirmasi berlapis tetap dibutuhkan.

"Kami berada di garis depan teknologi dan metode analisis. Meskipun hasilnya signifikan, ketidakpastian dari instrumen dan metode membuat verifikasi tambahan tetap penting," kata Beard.

Beard juga menyebutkan bahwa hanya teleskop generasi baru yang mampu memotret langsung planet seperti Gliese 251c. Salah satu teknologi yang diharapkan dapat melakukannya adalah Thirty Meter Telescope (TMT), teleskop raksasa dengan cermin utama berdiameter 30 meter.

"TMT adalah satu-satunya teleskop yang nantinya memiliki resolusi cukup tinggi untuk melakukan direct imaging eksoplanet seperti ini. Teleskop

lebih kecil tidak akan mampu," tambahnya.

Dengan jaraknya yang relatif dekat serta posisinya di zona layak huni, Gliese 251c menjadi salah satu kandidat terkuat untuk dipelajari lebih dalam. Jika instrumen masa depan mampu menangkap gambar langsung atau mendeteksi atmosfernya, planet ini dapat menjadi kunci untuk memahami bagaimana kehidupan bisa muncul di dunia lain.

Studi mengenai Gliese 251c telah diterbitkan dalam The Astronomical Journal, menandai langkah baru dalam pencarian panjang manusia untuk menjawab pertanyaan terbesar dalam sains modern: Apakah kita sendirian di alam semesta?

Penelitian lebih lanjut dari teleskop generasi berikutnya akan menjadi babak penting berikutnya dalam eksplorasi kosmos, sekaligus membuka peluang untuk memahami sejauh mana kehidupan dapat berkembang di sekitar bintang-bintang kecil seperti Gliese 251. (wid,rls,ant/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

SETOP KERAMAS BOROS AIR

Keramas adalah bagian dari rutinitas kebersihan yang nyaris tak terpisahkan dari kehidupan modern. Namun di balik sensasi segar yang ditinggalkannya, aktivitas ini ternyata menyumbang porsi besar konsumsi air rumah tangga. Di tengah krisis air global dan meningkatnya kebutuhan keberlanjutan, sudah saatnya kebiasaan keramas dievaluasi ulang agar tidak menjadi pemicu pemborosan yang tak disadari.

Dalam rumah tangga perkotaan Indonesia, konsumsi air rata-rata bisa mencapai 169,11 liter per orang per hari untuk kelompok kelas menengah. Dari total tersebut, penggunaan air untuk mandi dan aktivitas di kamar mandi menempati posisi tertinggi—sekitar 45% atau sekitar 60 liter per hari. Angka ini menunjukkan betapa besar pengaruh satu kebiasaan sederhana terhadap total penggunaan air harian.

Jumlah air yang terbuang ketika keramas sangat bergantung pada durasi dan jenis kepala pancuran. Pancuran standar menghabiskan sekitar 8 liter per menit, sementara pancuran klasik bisa mencapai 15 hingga 20 liter per menit. Jika dihitung, mandi 5 menit dapat menguras 75 hingga 100 liter air.

Ketika durasinya dua kali lipat hingga 10 menit, air yang terbuang bisa menembus 160 sampai 200 liter jika tidak ada sistem hemat air. Bahkan di salon, satu sesi keramas saja yang berlangsung 7–10 menit masih menghabiskan 53–75 liter air—angka yang jarang disadari pelanggan. Fenomena ini tak sekadar berdampak pada penggunaan air

rumah tangga, tetapi juga memengaruhi lingkungan secara lebih luas. Penggunaan air yang tinggi berkontribusi pada berkurangnya ketersediaan air bersih di alam. Ketika cadangan air tanah terus diambil tanpa pengaturan, maka ekosistem akan terganggu dan pasokan untuk kebutuhan penting lainnya juga terancam.

Kebiasaan menggunakan air panas saat keramas memperburuk situasi. Pemanasan air memerlukan energi yang biasanya bersumber dari bahan bakar fosil.

Itu berarti semakin lama keramas, semakin besar pula jejak karbon yang dihasilkan dari energi pemanas air. Dampaknya berujung pada emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim. Tak hanya itu, sampo dan kondisioner yang digunakan setiap hari membawa konsekuensi lain. Kandungan kimia dalam produk perawatan rambut akan terbawa aliran air ke sistem pembuangan.

Meskipun telah melalui proses pengolahan, residu kimia tetap berpotensi mencemari perairan dan mengganggu organisme akuatik. Artinya,

setiap produk yang dipilih dan seberapa sering kita menggunakannya turut menentukan dampak ekologisnya.

Mengurangi pemborosan air saat keramas bukan berarti mengorbankan kebersihan atau kesehatan rambut. Mematikan keran ketika sedang mengaplikasikan sampo atau kondisioner adalah salah satu strategi paling mudah.

Hidupkan kembali air hanya untuk membilas, sehingga pemakaian air dapat berkurang secara signifikan. Mempersingkat waktu mandi juga sangat efektif. Hanya dengan memotong durasi mandi 2 menit saja, seseorang bisa menghemat sekitar 30 hingga 40 liter air.

Penggunaan kepala pancuran hemat air (low-flow showerhead) menjadi solusi lain yang efektif. Jenis pancuran ini dapat memangkas penggunaan air hingga 50% tanpa membuat tekanan air berkurang. Perubahan kecil ini mampu memberi dampak besar, terutama di rumah tangga dengan jumlah penghuni banyak.

Selain itu, frekuensi keramas pun sebaiknya diperhatikan. Para ahli rambut tidak menyarankan keramas setiap hari karena dapat menghilangkan minyak

alami rambut dan menyebabkan kerusakan. Jarak ideal adalah 2–3 hari sekali. Untuk hari-hari ketika rambut mulai terasa lepek, penggunaan sampo kering adalah alternatif yang praktis dan tidak membutuhkan air sama sekali. Produk ini menyerap minyak dan memberi efek segar tanpa harus dibilas.

Meski demikian, ketika tiba waktunya membilas rambut, pastikan residu sampo terangkat seluruhnya. Pembilasan yang tidak tuntas dapat menyebabkan iritasi kulit kepala, ketombe, dan rambut kusam.

Gunakan air bersuhu sedang, bukan air panas, agar lebih hemat energi dan lebih aman bagi kesehatan rambut. Air panas yang terlalu tinggi dapat merusak kutikula rambut, menyebabkannya rapuh dan kering.

Dengan memahami berapa besar air yang sebenarnya dibutuhkan ketika keramas, kita bisa mulai mengubah kebiasaan sehari-hari menjadi lebih bijak.

Tidak hanya membantu menekan konsumsi air rumah tangga, tetapi juga turut menjaga keberlanjutan lingkungan. Rutinitas sederhana ini, ketika dilakukan dengan cara yang tepat, mampu memberi dampak positif bagi bumi sekaligus tetap menjaga kesehatan rambut. (fim,rls/dya)

BAHAN KIMIA DALAM SAMPO YANG BERBAHAYA BAGI RAMBUT DAN KESEHATAN.

SLS/Sulfat

Membuat rambut kering, kusam, dan memicu iritasi.

Paraben

Berfungsi sebagai pengawet tetapi dapat mengganggu hormon.

Formalin

Dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker.

Triclosan

mengganggu hormon dan sistem imun.

PEG

bisa terkontaminasi dioxane, zat pemicu kanker.

Propilen glikol

Menyebabkan iritasi kulit dan mata.

Isopropil alkohol

Terlalu menghilangkan minyak alami sehingga rambut rapuh.

Parfum sintetis

berpotensi memicu alergi dan iritasi, terutama pada kulit sensitif.

Prabowo Berkeras Hati ...dari hal 1

Pernyataan itu disampaikan Prabowo usai meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025). Menjawab isu mengenai membengkaknya utang proyek Whoosh yang disebut menekan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Prabowo menepis kekhawatiran tersebut dan memastikan proyek tetap jalan.

"Insyaallah, saya minta tidak hanya Surabaya, tetapi juga Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu. Sekarang saya Banyuwangi," ujar Prabowo di hadapan wartawan.

Pemerintahan di bawah Kabinet Merah Putih, kata Prabowo, kini memusatkan perhatian pada penguatan moda transportasi massal berbasis rel. Ia telah memberi instruksi kepada PT KAI (Persero) untuk memperluas jaringan kereta api di berbagai daerah, termasuk mempercepat penyediaan armada baru di kawasan Jabodetabek.

"Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, mengajukan Rp4,8 triliun, saya setuju Rp5 triliun," ujar Prabowo. Ia menegaskan agar pengadaan rangkaian baru itu rampung dalam satu tahun.

Tak hanya di Jawa, Prabowo menyatakan pemerintah juga berencana memperluas jaringan rel ke Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Ia menugaskan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk menyiapkan langkah teknis dan koordinasi antarwilayah.

"Transportasi kereta adalah tulang punggung pembangunan. Kita ingin Indonesia tersambung dari barat ke timur dengan moda yang efisien," kata Prabowo dalam kesempatan terpisah.

Sebelum pernyataan Prabowo, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan juga telah memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya akan terus berlanjut. Ia mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan preliminary study untuk pengembangan jalur tersebut, yang nantinya menjadi dasar perluasan jaringan transportasi cepat di Pulau Jawa.

"Kita sudah bikin plan preliminary study mengenai Whoosh ini sampai ke Surabaya. Jawa ini akan menjadi kota pulau, jadi transportasi itu dibutuhkan sampai ke Surabaya," kata Luhut di Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Menurut Luhut, kajian awal proyek itu mencakup jalur Bandung-Kertajati-Purworejo-Cilac

ap-Solo-Surabaya. Evaluasi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dijadikan acuan agar pengembangan berikutnya lebih efisien dan minim kendala teknis.

Keputusan memperluas jalur Whoosh hingga Banyuwangi pun disambut hangat oleh masyarakat di ujung timur Pulau Jawa. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyebut pernyataan presiden itu sebagai kabar menggembirakan bagi daerahnya.

"Ini kabar gembira bagi daerah, terutama warga Banyuwangi. Kami berterima kasih dan siap mendukung program pemerintah pusat untuk memperpanjang trayek kereta cepat sampai ke Banyuwangi," ujar Ipuk.

Menurut Ipuk, keberadaan kereta cepat akan memperkuat konektivitas antardaerah di Pulau Jawa bagian timur. Selama ini, Banyuwangi sudah memiliki bandara yang melayani penerbangan ke Jakarta dan Surabaya, serta Pelabuhan Ketapang yang merupakan salah satu pelabuhan tersibuk di Indonesia.

"Dengan adanya kereta cepat, konektivitas di Jawa akan semakin lengkap. Ini bukan hanya mempersingkat waktu perjalanan, tapi juga membuka peluang ekonomi baru," kata Ipuk.

Pemerintah daerah menilai proyek ini berpotensi meningkatkan sektor pariwisata dan mempercepat distribusi logistik.

Data Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjukkan jumlah wisatawan pada 2024 mencapai 3,2 juta orang, naik dari 3,1 juta pada 2023. Kunjungan wisatawan mancanegara pun melonjak dari 69.639 menjadi 122.904 pada periode yang sama.

Pertumbuhan pengguna transportasi kereta api menuju Banyuwangi juga terus meningkat. PT KAI Daerah Operasi (Daop) 9 Jember mencatat, pada triwulan III 2025, Stasiun Banyuwangi Kota, Ketapang, dan Kalisetail menempati tiga posisi teratas setelah Stasiun Jember. Bila digabungkan, jumlah penumpang dari tiga stasiun di Banyuwangi menjadi yang tertinggi di wilayah kerja Daop 9.

Isu Utang: Saya Tanggung Jawab

Meski proyek Whoosh kerap dikaitkan dengan isu pembengkakan utang dan potensi beban fiskal bagi BUMN, Prabowo memastikan pemerintahannya akan menanggung penuh tanggung jawab tersebut. Ia meminta publik tidak memperkeruh situasi dengan spekulasi yang tidak berdasar.

"Gak usah ribut. Saya tanggung jawab," tegasnya dalam pernyataan sebelumnya.

Luhut Pandjaitan turut menegaskan bahwa pembiayaan proyek lanjutan akan dirancang dengan lebih hati-hati. Pemerintah menimbang alternatif pendanaan non-APBN agar tidak menambah tekanan fiskal negara.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebelumnya menyebut salah satu opsi adalah memanfaatkan skema public-private partnership (PPP) serta kerja sama investasi dengan mitra strategis dari dalam dan luar negeri.

Proyek Whoosh Jakarta-Bandung sendiri merupakan hasil kerja sama Indonesia dan Tiongkok yang mulai beroperasi pada 2023. Meskipun sempat menuai kritik karena pembengkakan biaya, proyek tersebut tetap dinilai berhasil memperkenalkan teknologi transportasi berkecepatan tinggi di Indonesia.

Dalam arah kebijakannya, Prabowo menekankan bahwa pembangunan transportasi publik bukan semata soal perhitungan untung rugi, melainkan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan sosial dan integrasi ekonomi nasional.

"Transportasi publik itu jangan dihitung untung ruginya. Yang penting rakyat diuntungkan, negara maju," ujar Prabowo dalam kesempatan lain.

Terpisah, Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara Indonesia), Rosan Perkasa Roeslani memastikan, pembahasan antara Indonesia dengan China terkait skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Kereta Whoosh, masih berlangsung.

Hingga saat ini, kata Rosan yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) itu, belum ada kesepakatan yang bersifat final. "Semuanya (pembahasan) masih berjalan, belum ada keputusan," kata Rosan kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Rosan menjelaskan, proses negosiasi dilakukan tim lintas kementerian dan lembaga (K/L) pemerintah Indonesia. Termasuk Kemenko Infrastruktur, Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), serta BPI Danantara.

"Ini arahan dan juga kerja sama dari kita, semua dibutuhkan dan arahan presiden memang perlu kehadiran pemerintah, untuk kepentingan transportasi. Memang tidak hanya dilihat dari segi untung-rugi saja. Tetapi, dampaknya kepada masyarakat dan melihat kepada undang-undang yang ada. Ini memang menjadi tugas pemerintah," ujar

mantan Ketua Umum Kadin Indonesia dan Dubes RI untuk AS itu.

Rosan menambahkan, kehadiran pemerintah dalam proyek transportasi publik seperti Kereta Whoosh, merupakan bagian dari tanggung jawab. Pemerintah juga memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat luas.

"Memang kereta apa adalah transportasi umum untuk kepentingan masyarakat luas dan oleh sebab itu kehadiran pemerintah memang akan ada dan hadir dalam program transportasi termasuk Kereta Whoosh," jelas mantan Ketua TKN (Tim Kampanye Nasional) Prabowo-Gibran itu.

Disinggung PDIP

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menyebut lembaganya sejak lama telah merekomendasikan pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Namun, pemerintah kala itu hanya merealisasikan rute Jakarta-Bandung.

"Banggar dari awal tidak bicara Bandung. Rekomendasinya sejak 2017 sudah untuk Jakarta-Surabaya," ujar Said di Kompleks DPR RI, Selasa (4/11/2025).

Pernyataan Said menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan proyek kereta cepat Whoosh hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Padahal, proyek ini masih dibayangi beban utang sekitar Rp2 triliun per tahun.

Meski demikian, DPR memastikan tetap mendukung kelanjutan pembangunan tersebut dan tidak akan menjadikan polemik utang Whoosh sebagai alasan untuk menunda proyek transportasi strategis itu.

Namun, Said yang juga politisi PDI Perjuangan (PDIP) menyindir rencana pemerintah membayar utang proyek Whoosh menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai utang itu seharusnya menjadi tanggung jawab perusahaan Danantara—badan usaha yang menaungi proyek kereta cepat—bukan dibebankan pada negara.

"Whoosh ini awalnya proyek business to business. Setelah diambil alih pemerintah, otomatis risiko dan kepemilikan ikut terbagi—60 persen Indonesia, 40 persen China. Maka logis jika kewajiban finansialnya diselesaikan oleh korporasi, bukan APBN," jelasnya.

Said menambahkan bahwa secara hukum, BUMN seperti Danantara berdiri mandiri di luar struktur Kementerian Keuangan. Karena itu, ia menilai wajar jika perusahaan tersebut menanggung seluruh kewajiban proyek, termasuk liabilitas dan utangnya. (gus,ist,ini,rls/dya)



DPRD Jatim Bentuk Pansus BUMD

PASTIKAN KINERJA DAN TATA KELOLA UNTUK DONGKRAK PAD



Anggota Komisi C DPRD Jatim sekaligus Anggota Pansus BUMD, Fuad Bernardi



Ketua Komisi A DPRD Jatim sekaligus Anggota Pansus BUMD, Dedi Irwansa



Wakil Ketua DPRD Jatim, Sri Wahyuni. (Foto-foto: Humas DPRD Jatim)

SURABAYA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sri Wahyuni, menyebut Pansus BUMD akan menjadi momentum penting untuk membenahi secara menyeluruh kinerja dan tata kelola perusahaan milik daerah. Menurutnya, pembentukan pansus merupakan bentuk keseriusan legislatif dalam memastikan bahwa setiap BUMD benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

"Pansus akan menyoroti aspek tata kelola, investasi, termasuk langkah penting inovasi bisnis yang akan dilakukan. Pembentukan Pansus ini diharapkan menjadi momentum berbenah bagi BUMD," ungkap Sri Wahyuni, Selasa (4/11/2025).

Politikus Partai Demokrat tersebut menegaskan, gagasan pembentukan Pansus dilatarbelakangi oleh perbedaan kinerja antar-BUMD di Jawa Timur. Ada BUMD yang telah memberikan kontribusi besar terhadap PAD, namun tidak sedikit pula yang masih belum optimal. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dikaji secara mendalam agar potensi yang dimiliki BUMD dapat dimaksimalkan secara sistematis.

"Hal-hal itu yang membuat kita akhirnya sepakat membentuk Pansus. Dengan adanya Pansus akan jelas persoalan yang ada di BUMD kita, yang nantinya dapat kita urai menjadi rekomendasi yang ujung-ujungnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tegasnya.

Selain itu, Sri Wahyuni juga menyoroti adanya sejumlah regulasi yang dinilai membatasi ruang gerak BUMD, sehingga berdampak pada

efektivitas dan daya saing perusahaan daerah. Ia berharap pansus dapat mengidentifikasi kendala tersebut sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih solutif dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi.

Lebih lanjut, Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur sekaligus anggota pansus BUMD, Dedi Irwansa menuturkan, agenda selanjutnya adalah menentukan ketua, sekretaris, dan bendahara Pansus BUMD.

"Sebagian besar anggota Pansus BUMD Jatim juga merangkap anggota Banggar DPRD Jatim yang ada kegiatan lain di luar kota, sehingga rapat pembentukan ketua Pansus BUMD Jatim terpaksa ditunda," ujar Dedi.

Dedi tidak menampik bahwa berdasarkan kultur yang selama ini berlaku di lingkungan DPRD Jatim, posisi ketua pansus kerap diberikan kepada fraksi yang mengajukan atau memiliki keterkaitan erat dengan isu yang dibahas. Ia menyebut peluang Fraksi Demokrat untuk menempati posisi ketua cukup terbuka, namun keputusan akhir tetap bergantung pada kesepakatan bersama seluruh anggota pansus.

"Sesuai dengan kultur yang selama ini berjalan di DPRD Jatim, maka utusan yang ditunjuk sebagai ketua Pansus kali ini adalah Fraksi Partai Demokrat. Namun karena DPRD Jatim ini lembaga politik, tentu semua kemungkinan bisa saja terjadi asal ada kesepakatan bersama," jelasnya.

Meski demikian, Dedi menegaskan pihaknya tidak ingin mendahului hasil keputusan resmi yang akan diambil melalui rapat internal. Ia memastikan bahwa proses pemilihan pimpinan pansus akan berjalan secara demokratis dengan mempertimbangkan asas proporsionalitas dan keterwakilan fraksi.

"Anggota Pansus BUMD Jatim belum menggelar rapat, sehingga kami tidak mau mendahului bahwa yang akan ditunjuk sebagai ketua nantinya itu utusan dari Fraksi Partai Demokrat," paparnya.

Bila Rugi Diusulkan Tutup

Sementara itu, dari Fraksi PDI Perjuangan, Fuad Bernardi yang juga merupakan anggota Pansus BUMD menegaskan, pihaknya akan menyoroti secara detail kinerja dan laporan keuangan seluruh BUMD di Jawa Timur. Ia menilai kontribusi sejumlah BUMD terhadap PAD masih jauh dari harapan, terutama jika dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal yang telah diberikan oleh pemerintah provinsi.

"Fraksi PDI Perjuangan akan menelaah BUMD dan anak perusahaannya terkait kinerja serta laporan keuangan. Kita ingin membedah kenapa setoran dividen dari BUMD ini masih rendah. Dari sembilan BUMD yang dimiliki Jatim, kontribusinya belum optimal. Dibandingkan dengan Jawa Tengah yang memiliki struktur BUMD serupa, setoran dividennya bisa mencapai dua kali lipat," ungkap Fuad.

Fuad mencontohkan, meski Bank Jatim menjadi penyumbang terbesar dengan dividen mencapai Rp420 miliar untuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dari total pembagian Rp821 miliar pada tahun buku 2024, kontribusi dari BUMD lain seperti PT Panca Wira Usaha (PWU) dan PT Jatim Grha Utama (JGU) justru menurun drastis. Berdasarkan laporan keuangan terakhir, PWU hanya mampu menyeter sekitar Rp1 miliar, turun hampir 47 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sementara JGU juga mengalami penurunan lebih dari 50

persen dibandingkan capaian 2023.

"Ada BUMD yang secara omzet besar, tapi tingkat keuntungannya rendah bahkan di bawah 10 persen. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita semua. Di tengah upaya efisiensi APBD, BUMD seharusnya bisa menjadi sumber PAD yang kuat, bukan justru membebani," tambah Fuad.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti persoalan tunggakan setoran dividen dari beberapa BUMD sejak 2022 hingga 2024, termasuk pengelolaan hutang dan penundaan pembayaran laba kepada pemerintah daerah. Menurut Fuad, hal tersebut mencerminkan lemahnya sistem tata kelola dan pengawasan internal perusahaan daerah.

"BUMD JGU memiliki permasalahan serius terkait setoran dividen 2022-2024 yang belum tuntas. Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, beberapa direksi justru diperpanjang masa jabatannya. Ini menimbulkan pertanyaan soal mekanisme evaluasi dan akuntabilitas kinerja," tegasnya.

Fuad menyatakan bahwa pemerintah provinsi harus mengambil langkah tegas terhadap BUMD yang terus merugi atau tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Ia bahkan menyarankan agar BUMD yang tidak produktif dilakukan restrukturisasi, merger, atau likuidasi jika memang tidak memiliki prospek keberlanjutan usaha.

"Kalau memang ada BUMD atau anak usaha yang terus merugi dan tidak memberi manfaat ekonomi bagi daerah, lebih baik ditutup saja. Tapi bagi yang kinerjanya baik, seperti Bank Jatim atau BUMD air bersih yang sudah menunjukkan peningkatan, perlu diperkuat dan diperluas kontribusinya," pungkasnya. (Pra/adv/Dya)